



# BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 92);
13. Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 340).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BDPRD, adalah dana yang diterima Desa 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan BDPRD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Berdasarkan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran BDPRD untuk setiap Desa.
- (4) Pengalokasian BDPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan dari Desa masing-masing.
- (5) Besaran BDPRD yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN BAGIAN DESA DARI PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyaluran BDPRD setiap desa disalurkan oleh Daerah kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Mei sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran BDPRD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menerima persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak;
  - c. khusus bagi Desa dengan jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahap II dapat diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) jika realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak.

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGIAN DESA DARI PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penggunaan BDPRD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mewujudkan Misi - II Bupati Bima yaitu membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat dengan mengedepankan penegakan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan daerah dan pemerintahan yang kuat dan stabil.
- (2) Penggunaan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dialokasikan pada bidang pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan perlindungan gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.
- (3) Penggunaan BDPRD dapat dilakukan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa setelah prioritas penggunaan BDPRD sebagaimana ketentuan ayat (1) terpenuhi.
- (4) Penggunaan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengacu pada prioritas penggunaan BDPRD yang dituangkan dalam RKPDesa.

**BAB V**  
**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN DESA**  
**DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 5**

- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan BDPRD setiap semester kepada Bupati dan ditembuskan kepada Camat.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - c. Laporan realisasi penggunaan BDPRD tahun anggaran sebelumnya;
  - d. Laporan realisasi penggunaan BDPRD semester pertama.
- (7) Laporan realisasi penggunaan BDPRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (8) Laporan realisasi penggunaan BDPRD semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 28 - Jan - 2019

**BUPATI BIMA,**  
  
**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 28 - Jan - 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**

  
**S.H.M. TAUFIK HAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR .500

GGAL

: 6 TAHUN 2019  
: 28 Januari 2019

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
<b>I MONTA</b>					
1	Tolotangga	12,234,259.00	6,420,515.00	18,654,774.00	
2	Sondo	12,234,259.00	17,117,582.00	29,351,841.00	
3	Simpasai	12,234,259.00	7,046,936.00	19,281,195.00	
4	Sic	12,234,259.00	27,705,431.00	39,939,690.00	
5	Tangga	12,234,259.00	9,106,494.00	21,340,753.00	
6	Monta	12,234,259.00	5,888,312.00	18,122,571.00	
7	Sakuru	12,234,259.00	6,717,443.00	18,951,702.00	
8	Baralau	12,234,259.00	6,644,003.00	18,878,262.00	
9	Tolotwi	12,234,259.00	4,183,364.00	16,417,623.00	
10	Wilanaci	12,234,259.00	3,673,282.00	15,907,541.00	
11	Pela	12,234,259.00	5,518,535.00	17,752,794.00	
12	Tangga Baru	12,234,259.00	1,587,842.00	13,822,101.00	
13	Nontotera	12,234,259.00	7,042,701.00	19,276,960.00	
14	Waru	12,234,259.00	217,387.00	12,451,646.00	
		<b>171,279,626.00</b>	<b>108,869,827.00</b>	<b>280,149,453.00</b>	
<b>II BOLO</b>					
1	Tambe	12,234,259.00	13,377,774.00	25,612,033.00	
2	Rasubou	12,234,259.00	9,780,916.00	22,015,175.00	
3	Ruto	12,234,259.00	48,357,184.00	60,591,443.00	
4	Kananga	12,234,259.00	19,661,039.00	31,895,298.00	
5	L e u	12,234,259.00	8,795,915.00	21,030,174.00	
6	Timu	12,234,259.00	13,659,315.00	25,893,574.00	
7	Bontokape	12,234,259.00	11,057,741.00	23,292,000.00	
8	Sondosia	12,234,259.00	8,853,840.00	21,088,099.00	
9	Nggembe	12,234,259.00	8,533,623.00	20,767,882.00	
10	Sanolo	12,234,259.00	12,047,170.00	24,281,429.00	
11	Tumpu	12,234,259.00	2,013,018.00	14,247,277.00	
12	Rada	12,234,259.00	6,018,132.00	18,252,391.00	
13	Kara	12,234,259.00	1,594,868.00	13,829,127.00	
14	Darussalam	12,234,259.00	3,055,945.00	15,290,204.00	
		<b>171,279,626.00</b>	<b>166,806,480.00</b>	<b>338,086,106.00</b>	
<b>III WOHA</b>					
1	Keii	12,234,259.00	4,411,311.00	16,645,570.00	
2	Tengu	12,234,259.00	7,869,041.00	20,103,300.00	
3	Tente	12,234,259.00	20,495,300.00	32,729,559.00	
4	Rahakodo	12,234,259.00	11,885,697.00	24,119,956.00	
5	Samili	12,234,259.00	6,512,675.00	18,746,934.00	
6	Kalampa	12,234,259.00	13,825,536.00	26,059,795.00	
7	Risa	12,234,259.00	6,106,514.00	18,340,773.00	
8	Pandai	12,234,259.00	21,191,623.00	33,425,882.00	
9	Donggobolo	12,234,259.00	16,597,316.00	28,831,575.00	
10	Dadibou	12,234,259.00	20,132,422.00	32,366,681.00	
11	Talabitu	12,234,259.00	8,512,001.00	20,746,260.00	
12	Naru	12,234,259.00	11,220,195.00	23,454,454.00	
13	Nisa	12,234,259.00	6,540,344.00	18,774,603.00	
14	Waduwan	12,234,259.00	3,412,894.00	15,647,153.00	
15	Penapali	12,234,259.00	19,486,899.00	31,721,158.00	
		<b>183,513,885.00</b>	<b>178,199,768.00</b>	<b>361,713,653.00</b>	
<b>IV BELO</b>					
1	Acera	12,234,259.00	4,774,756.00	17,009,015.00	
2	Lido	12,234,259.00	4,422,283.00	16,656,542.00	
3	Ngali	12,234,259.00	5,450,091.00	17,684,350.00	
4	Renda	12,234,259.00	6,421,487.00	18,655,746.00	
5	Cenggu	12,234,259.00	4,789,515.00	17,023,774.00	
6	Runngu	12,234,259.00	3,122,929.00	15,357,188.00	
7	Soki	12,234,259.00	722,423.00	12,956,682.00	
8	Rolka	12,234,259.00	3,733,291.00	15,967,550.00	
9	Diha	12,234,259.00	488,801.00	12,723,060.00	
		<b>110,108,331.00</b>	<b>33,925,576.00</b>	<b>144,033,907.00</b>	

REKAMATAH DAFTAR KONTRIBUSI DAERAH					
KECAMATAN / DESA		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	KET.
1	2	3	4	5 = 3+4	6
<b>V WAWO</b>					
1	Tarlawi	12,234,259.00	4,003,429.00	16,237,688.00	
2	Ntori	12,234,259.00	4,714,377.00	16,948,636.00	
3	Maria	12,234,259.00	12,244,771.00	24,479,030.00	
4	Pesa	12,234,259.00	10,011,988.00	22,246,247.00	
5	Raba	12,234,259.00	19,035,517.00	31,269,776.00	
6	Kambilo	12,234,259.00	12,564,145.00	24,798,404.00	
7	Maria Utara	12,234,259.00	10,845,613.00	23,079,872.00	
8	Kombo	12,234,259.00	11,351,264.00	23,585,523.00	
9	Riamau	12,234,259.00	2,679,551.00	14,913,810.00	
		<b>110,108,331.00</b>	<b>87,450,655.00</b>	<b>197,558,986.00</b>	
<b>VI SAPE</b>					
1	Sari	12,234,259.00	16,933,088.00	29,167,347.00	
2	Boke	12,234,259.00	9,090,352.00	21,324,611.00	
3	Jia	12,234,259.00	11,523,663.00	23,757,922.00	
4	Bugis	12,234,259.00	22,377,786.00	34,612,045.00	
5	Naru	12,234,259.00	9,284,034.00	21,518,293.00	
6	Rasabou	12,234,259.00	14,697,143.00	26,931,402.00	
7	Sangia	12,234,259.00	11,214,786.00	23,449,045.00	
8	Nae	12,234,259.00	9,207,687.00	21,441,946.00	
9	Rai Oi	12,234,259.00	9,949,788.00	22,184,047.00	
10	Parangina	12,234,259.00	3,510,511.00	15,744,770.00	
11	Kowo	12,234,259.00	14,020,295.00	26,254,554.00	
12	Buncu	12,234,259.00	7,634,144.00	19,868,403.00	
13	Puju	12,234,259.00	12,364,279.00	24,598,538.00	
14	Bajo Pulo	12,234,259.00	3,593,260.00	15,827,519.00	
15	Naru Barat	12,234,259.00	11,092,097.00	23,326,356.00	
16	Tanah Putih	12,234,259.00	6,686,080.00	18,920,339.00	
17	Lannere	12,234,259.00	0.00	12,234,259.00	
18	Oi Maci	12,234,259.00	6,120,346.00	18,354,605.00	
		<b>220,216,662.00</b>	<b>179,299,339.00</b>	<b>399,516,001.00</b>	
<b>VII WERA</b>					
1	Ntoke	12,234,259.00	2,954,401.00	15,188,660.00	
2	Pai	12,234,259.00	6,226,496.00	18,460,755.00	
3	Nunggi	12,234,259.00	6,620,200.00	18,854,459.00	
4	Tawali	12,234,259.00	5,783,966.00	18,018,225.00	
5	Hidirasa	12,234,259.00	4,133,936.00	16,368,195.00	
6	Wora	12,234,259.00	6,263,917.00	18,498,176.00	
7	Sangiang	12,234,259.00	7,137,524.00	19,371,783.00	
8	Bala	12,234,259.00	3,813,752.00	16,048,011.00	
9	Oi Tui	12,234,259.00	8,427,516.00	20,661,775.00	
10	Tadewa	12,234,259.00	2,472,172.00	14,706,431.00	
11	Nanga Wera	12,234,259.00	1,039,739.00	13,273,998.00	
12	Ranggasolo	12,234,259.00	3,616,263.00	15,850,522.00	
13	Kalajena	12,234,259.00	5,825,727.00	18,059,986.00	
14	Mandala	12,234,259.00	3,084,619.00	15,318,878.00	
		<b>171,279,626.00</b>	<b>67,400,228.00</b>	<b>238,679,854.00</b>	
<b>VIII DONGGO</b>					
1	Doridungga	12,234,259.00	3,888,934.00	16,123,193.00	
2	Kala	12,234,259.00	3,912,256.00	16,146,515.00	
3	O'o	12,234,259.00	6,382,393.00	18,616,652.00	
4	Mbuwa	12,234,259.00	8,899,110.00	21,133,369.00	
5	Palama	12,234,259.00	3,467,728.00	15,701,987.00	
6	Rora	12,234,259.00	4,627,675.00	16,861,934.00	
7	Mpili	12,234,259.00	4,917,489.00	17,151,748.00	
8	Bumi Pajo	12,234,259.00	4,889,128.00	17,123,387.00	
9	Ndano NaE	12,234,259.00	2,924,590.00	15,158,849.00	
		<b>110,108,331.00</b>	<b>43,909,303.00</b>	<b>154,017,634.00</b>	
<b>IX SANGGAR</b>					
1	Piong	12,234,259.00	7,249,050.00	19,483,309.00	
2	Boro	12,234,259.00	8,827,393.00	21,061,652.00	
3	Kore	12,234,259.00	11,196,183.00	23,430,442.00	
4	Taloko	12,234,259.00	6,296,555.00	18,530,814.00	
5	Oi Saro	12,234,259.00	8,273,167.00	20,507,426.00	
6	Sanduc	12,234,259.00	1,406,039.00	13,640,298.00	
		<b>73,405,554.00</b>	<b>43,248,387.00</b>	<b>116,653,941.00</b>	

KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.	
	Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa		
1	2	3	4	5 = 3+4	6
<b>XV BOROMANDI</b>					
1 Bajo	12,234,259.00	2,231,711.00	14,465,970.00		
2 Pundi	12,234,259.00	4,192,220.00	16,426,479.00		
3 Wadu Kopa	12,234,259.00	1,896,752.00	14,131,011.00		
4 Kananta	12,234,259.00	4,468,691.00	16,722,950.00		
5 Sal	12,234,259.00	2,104,179.00	14,338,438.00		
6 Sampungu	12,234,259.00	1,636,099.00	13,870,358.00		
7 Lewintana	12,234,259.00	466,263.00	12,700,522.00		
	<b>85,639,813.00</b>	<b>17,015,915.00</b>	<b>102,655,728.00</b>		
<b>XVI PARADO</b>					
1 Parado Wanc	12,234,259.00	14,407,599.00	26,641,858.00		
2 Parado Rato	12,234,259.00	18,410,099.00	30,644,268.00		
3 Kuta	12,234,259.00	5,241,090.00	17,475,349.00		
4 Kanca	12,234,259.00	4,791,139.00	17,025,398.00		
5 Lere	12,234,259.00	2,808,580.00	15,042,839.00		
	<b>61,171,295.00</b>	<b>45,658,417.00</b>	<b>106,829,712.00</b>		
<b>XVII LAMBITU</b>					
1 Kaboro	12,234,259.00	5,563,386.00	17,797,645.00		
2 Kuta	12,234,259.00	3,660,535.00	15,894,794.00		
3 Sambori	12,234,259.00	6,117,207.00	18,251,466.00		
4 Teta	12,234,259.00	4,404,647.00	16,638,906.00		
5 Kaowa	12,234,259.00	1,727,843.00	13,962,102.00		
6 Londu	12,234,259.00	1,096,448.00	13,330,707.00		
	<b>73,405,554.00</b>	<b>22,572,266.00</b>	<b>95,977,820.00</b>		
<b>XVIII PALIBELO</b>					
1 Panda	12,234,259.00	21,504,193.00	33,738,452.00		
2 Belo	12,234,259.00	9,579,012.00	21,813,271.00		
3 Tonggondoa	12,234,259.00	8,667,034.00	20,901,293.00		
4 Tonggorisa	12,234,259.00	6,098,653.00	18,332,914.00		
5 Teke	12,234,259.00	8,192,746.00	20,427,005.00		
6 Ntonggu	12,234,259.00	5,475,374.00	18,709,633.00		
7 Nata	12,234,259.00	10,469,322.00	22,703,581.00		
8 Dore	12,234,259.00	1,332,251.00	13,566,510.00		
9 Roi	12,234,259.00	10,889,217.00	23,123,476.00		
10 Ragi	12,234,259.00	3,399,366.00	15,633,625.00		
11 Padolo	12,234,259.00	3,098,759.00	15,333,018.00		
12 Bre	12,234,259.00	3,100,118.00	15,334,377.00		
	<b>146,811,108.00</b>	<b>92,806,047.00</b>	<b>239,617,155.00</b>		
	<b>2,336,743,469.00</b>	<b>1,557,828,946.00</b>	<b>3,894,572,414.00</b>		



26/6

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

9